

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, N.A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, kabupaten Sidoarjo, Kebijakan dan Manajemen Publik. *Jurnal UNAIR*, Vol. 5 No. 3, 1-14.
- Bahrana, N., Naz'aina, & Haykal, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 77-89.
- Coryanata I., 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 2, 110-125.
- Creswell, Jhon. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dewi, I. M. (2011). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Friantama, P. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, Vol.3 No. 3, 12-19.
- Gashaw, A., & Tadesse, M. A. (2017). *Community Participation in Rural Development: The Case of Ethiopia*. *Ethiopian Journal of Economics*, Vol. 26 No. 1, 93-118.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBS SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, T. dan Fauzan. SE. M.Si. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, Thesis tidak dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

- Kaiser, H. dan Rice, J. (1974). *Education ang Psychological Measurement*. Sage Journal, Vol. 34 No. 1, 111-117.
- Lastri, S., & Gunawan, B. (2020). Pengaruh Pertisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor DPR Aceh). *Jurnal Akuntansi Muhamadiyah*, Vol. 10 No. 2, 207-215.
- Hardianti, L., & Pramono, A., S.E., M.Si. (2019). Pengaruh Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember. Diakses tanggal 7 April 2023, Skripsi tidak dipublikasikan. IAIN Jember, Jember.
- Mahdi, S. A., & Santoso, S. I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, 11-23.
- Maisur, & Ramzilah (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Terhadap pengawasan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, Vol. 9 No. 3, 1-8.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Nunnaly. (1967). *Psycometric Theory*. New York : MCGraw-Hill.
- Pagappong R.N., (2012). *Pengaruh AKuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Purwanto. (2022). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sekecamatan Bolangitang Barat. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 2. 134–143.
- Ramdhani, Zamzami, & Wiralestari (2021). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA*, Vol. 6 No. 2, 70-83.
- Rusmianto, Maryani, & Makhsun, A. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Essai*, Vol. 12 No. 1, 32-44.

- Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Diakses tanggal 5 Oktober 2022, <https://jdihn.go.id/files/4/1998tapmprXV.pdf>
- \_\_\_\_\_. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126339/permendagri-no-7-tahun-2008>.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Diakses tanggal 7 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- \_\_\_\_\_. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Diakses tanggal 5 Oktober 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses tanggal 7 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Diakses tanggal 5 Oktober 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- \_\_\_\_\_. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses tanggal 8 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Sekaran, U., & Roger, B. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Amerika Serikat: Jhon Wiley and Sons.
- Setyawati, Y. (2010). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi di Karesidenan Surakarta. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Silooy, R. W. (2022). Pengaruh *Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 1, 1-21.

- Siswanto, S., Hafizrianda, Y., & Antoh, A. (2017). Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 1 No. 2, 51-82.*
- Sumardi. (2010). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah: Teori, Konsep, dan Implementasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyadi. (2018). *Pengawasan Organisasi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Utami, K., dan Syofyan, E. (2013). Pengaruh pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan Publik. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 63-86.*
- Wonda, I., Karamoy, H., dan Ilat, V., (2013). Analisis Fungsi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Accountability, Vol. 2 No. 1, 199-211.*